

Mengapa Gus Dur selalu menggunakan tameng sikap para kiai salaf yang menolak kepemimpinan perempuan. Ini bukan persoalan politis. Ini masalah ideologis atau tafsir ideologi di lapisan kiai-kiai salaf. Kenapa misalnya PPP itu selalu menggunakan isu gender untuk menolak Megawati. Jadi bukan isu gendernya, menurut saya, yang mendasar, tetari tafsir PPP terhadap konfigurasi politik yang ada di PDI-P, yang secara ideologis berjarak begitu lebar dengan ideologi yang berkembang di PPP.

NU Harus Tegaskan Khittah



BAHTIAR EFFENDY
Pengamat Sosial Politik

Muktamar NU mendatang dihadapkan pada tantangan yang cukup besar. Ada problem yang harus diselesaikan di level Muktamar berkaitan dengan Khittah 26. Khittah dibuat berdasarkan asumsi bahwa NU melepaskan diri dari ikatan partai sehingga langkahnya tidak dibatasi oleh institusi-institusi politik atau partai tertentu. Keputusan Muktamar NU tahun 1984 ini masih tetap berlaku. Namun sebelum ada perubahan lebih lanjut, NU kemudian membentuk dan hanya mengakui satu partai, yaitu PKB. Saya menduga memang NU sendiri menginginkan hanya ada satu partai. Padahal keinginan membentuk satu partai saja tentu tidak bisa diterima oleh seluruh warga nahdliyin. Di sisi lain NU pasti khawatir bila terdapat banyak partai, pamor PKB tidak akan sebagus yang diharapkan. Makanya Gus Dur buru-buru mengeluarkan pernyataan tentang telur dan tahi di televisi beberapa waktu lalu. Ini blunder!

Ini kan tidak mungkin karena selama ini partisipasi politik warga NU sudah tersebar. Ada yang di Golkar, PPP, dan sebagainya

GALERI

Makanya tidak mungkin menyatukan mereka dalam satu parpol. Seharusnya PBNU menyadari hal ini. Jadi, meskipun membikin PKB, mestinya tidak dikaitkankan dengan PBNU, apalagi sampai diklaim sebagai satu-satunya anak kandung NU yang sah. Padahal bila tidak seperti itu, PKU, PNU, dan SUNI tidak akan merasa dipinggirkan, dan tidak akan ada problem dengan khittah. Bahkan justru merupakan ekspresi khittah dalam situasi politik yang agak bebas. Kalau dulu kan tidak hanya terpaku pada tiga partai. Pada tingkat tertentu, hal ini menimbulkan kegelisahan sebagian warga NU. Makanya, setelah itu ada yang memisahkan diri ke PKU, PNU, SUNI, dan sebagainya.

Semangat ke politik ini dapat dikatakan kelanjutan sejarah tahun 50-an ketika NU merubah dirinya menjadi partai. Dalam situasi politik bebas yang memungkinkan untuk mendirikan partai, NU akan cenderung menjadi partai atau mendirikan partai, karena NU memang berbeda dengan Muhammadiyah. NU sulit dipisahkan dari godaan politik. Dahulupun NU mentransformasikan dirinya menjadi partai sehingga hampir-hampir apa yang disebut PBNU ketika itu berada di bawah bayang-bayang partai NU. Nah, sekarang ada PKB, dan sesungguhnya secara empirik NU bisa dikatakan berada dalam bayang-bayang PKB. Sekarang orang jarang membicarakan NU dalam pengertian PBNU-nya saja, melainkan selalu terkait dengan PKB. Mungkin ini sebagai eksperimen baru. NU sekarang tidak melebur ke dalam partai, tetapi mendirikan dan hanya mengakui secara formal PKB. Tapi masalahnya, saat ini kan suasananya berbeda dengan masa

lalu, meskipun yang sekarang merupakan kelanjutan masa lalu. Bagaimanapun terdapat perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan. Dulu tidak ada sempalan-sempalan. Hampir semua aktivis politik NU bergabung dalam partai NU.

Saya kira sempalan itu muncul dilatarbelakangi oleh persoalan persepsi atau preferensi politik yang berbeda. Dulu hampir tidak ditemukan perbedaan-perbedaan yang mendasar. Sementara sekarang perbedaan itu sepertinya ada. Karena NU sendiri juga terbagi-bagi pada banyak kekuatan sosial politik. Bukan PBNU-nya, tapi warganya, aktivisnya, dan para tokohnya. Misalnya sebagian warga NU tidak bisa menerima posisi politik PKB sehingga mereka merasa harus membangun institusi politik baru yang sesuai bagi mereka. Contohnya PKU. Bagi orang-orang PKU saya kira ada perbedaan yang mendasar dalam kaitannya dengan PKB. Ini berpengaruh pada PBNU, sebab bagi orang-orang NU yang masuk partai-partai di luar PKB, mereka merasa seperti dianaktirikan. Saya tidak tahu apakah ini merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi NU secara keseluruhan atau tidak.

Namun apabila kita lihat dalam perspektif perolehan suara misalnya bisa menguntungkan NU karena sempalan itu dapat dianggap sebagai terjemahan lain dari khittah. Tapi kalau saja, misalnya, Gus Dur atau PBNU tidak menyatakan bahwa PKB merupakan satu-satunya anak politik NU yang diakui, maka mereka tidak akan dihadapkan pada problem organisasi yang berkaitan dengan khittah. Misalnya diam saja. Ketika ada sejumlah aktivis NU mendirikan PKB, ya sudah. Dengan sikap

seperti itu bisa diartikan bahwa pada dasarnya NU sebagai jam'iyah masih mempertahankan khittah karena membebaskan warganya dari keterkaitan dengan salah satu partai tertentu, dan NU secara organisasi menyatakan tidak mempunyai keterkaitan khusus dengan partai manapun. Dalam hal ini saya kira pemihakan secara terang-terangan kepada PKB, bisa menjadi blunder yang tidak terelakkan.

Maka langkah penting yang harus diambil oleh NU dalam Muktamar mendatang adalah NU harus mempertegas posisi, bagaimana maunya. Apakah PBNU secara politik diwakili PKB atau tidak. Kalau menurut saya, ya jangan. Tetap saja berpegang pada khittah 1926, yaitu tidak ikut dalam politik praktis serta dinyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan partai-partai politik manapun. Dalam hal ini, posisi Gus Dur dengan PKB jangan ditinggi-tinggikan. Ya sudahlah kalau memang telah terlanjur menjadi deklarator PKB. Ya sudah sampai di situ saja. Karena tidak bisa dia berlaku sebagai pribadi atau individu, kemudian berperan sebagai deklarator PKB. Orang akan mengasosiasikan atas nama ketua PBNU. Saya kira hal ini bisa dijernihkan dalam muktamar mendatang supaya jelas. Mungkin nanti perlu ditegaskan bahwa sewaktu mendeklarasikan partai, posisinya adalah sebagai individu atau sebagai orang yang kebetulan punya preferensi politik seperti itu sebagaimana ketika dia menyatakan mendukung Megawati secara pribadi, bukan merepresentasikan PBNU. Sebagai organisasi sosial keagamaan, secara resmi atau teoritis, otonom dan bebas dari kegiatan politik praktis. Maka pernyataan

bahwa PKB merupakan satu-satunya anak politik NU yang sah mesti diralat. Saya kira harus berani, dan saya melihat penegasan ini tidak akan menimbulkan apa-apa. Soalnya yang muncul kemarin adalah tekanan-tekanan yang mengharuskan lahirnya pernyataan semacam itu. Jika ini tidak dilakukan, ya masih akan rancu, kecuali kalau khittah dianulir dan kemudian NU kembali seperti periode 50-an ketika NU merubah dirinya menjadi partai.

Civil Society Akan Melemah

Konsekuensi lebih jauh dari terjunnya NU dalam politik adalah terpinggirnya proyek *civil society*. Ibaratnya dulu NU jualan *civil society* karena hubungannya dengan negara kan jauh. Bukannya NU sengaja mengambil jarak. Tapi berkali-kali mencoba untuk masuk, cuma agak susah. Baik dengan penerimaan asas tunggal maupun, macam-macam lah. Asas tunggal itu kan kalau kita baca, ya memang begitu. Karena dengan menerima asas tunggal diharapkan bakal ada akomodasi balikan dari negara untuk memberikan *reward* tertentu atas keteladanan menerima asas tunggal dibanding organisasi sosial keagamaan lainnya. Muhammadiyah misalnya, kan belakangan. NU yang pertama, bahkan jauh sebelum UU-nya diberlakukan.

Dari tahun 80-an sampai beberapa tahun selanjutnya NU kurang berhasil untuk berusaha masuk ke dalam negara, sehingga jualan *civil society*. Karena ada jarak dengan negara, maka NU mengembangkan wacana tentang perlunya *public sphere* yang lebih luas serta perlunya membangun kekuatan *civil society* melalui organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan

di luar negara. Wacana ideal ini memang berkembang, tetapi bentuknya yang paling kongkrit sebetulnya belum terealisasi. Namun sekarang ternyata tiba-tiba posisi NU sudah berpindah dan ganti dagangan. Ketika melihat adanya peluang, mereka seakan hendak ramai-ramai masuk negara. Dengan perolehan 50 lebih kursi, warga NU yang bergabung di PKB banyak yang masuk DPR. Padahal meskipun ada perdebatan, paratai itu tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari *civil society*, sebab nantinya pada suatu saat dia akan integral dengan negara. Apalagi kalau dia sampai memimpin atau menjadi bagian dari pemerintah. Belum lagi jika ditambahkan warga NU yang mungkin kelak ikut ramai-ramai masuk di tempat lain yang berada dalam lingkaran negara kerana suasananya cukup memungkinkan. Ini merupakan problem. Di saat wacana *civil society* sedang dibangun dan bentuk kongkritnya belum teralisasi, mereka sudah pindah proyek.

Melihat situasi sudah seperti ini, saya ragu kalau proyek *civil society* akan diteruskan oleh NU dalam pengertian yang solid. Artinya keraguan ini muncul terhadap pengurus NUnya, bukan organ-organ NU seperti LAKPESDAM, LKiS, dan sebagainya. Karena bisa dikatakan perhatian NU sudah terpecah dan tidak fokus lagi. Sementara kekuatan yang ada di balik kampanye *civil society* tersebut sudah berubah haluan. Apalagi, Gus Dur sekarang berhasil menjadi presiden. Padahal di sisi lain, *civil society* tidak ada urusannya dengan kepresidenan. *Civil society* berkaitan dengan organisasi-organisasi yang menjadi

intermediary organisation yang menjembatani kepentingan publik dengan pihak negara, mempunyai sikap *complementary* dan *supplementary* terhadap negara. Nah, di luar Gus Dur dan teman-temannya tidak ada kekuatan yang bisa mendorong tumbuhnya *civil society*, kecuali anak-anak muda NU sendiri. Sayangnya anak-anak mudanya itu belum sepenuhnya, paling tidak secara simbolik, otonom dan independen dari pengaruh itu. Jadi masih ada ketergantungan dengan institusi NU. Bagaimanapun, yang dilihat sehubungan dengan pengembangan *civil society* tersebut, sekali lagi, bukanlah LAKPESDAM-nya, P3M-nya, LKiS-nya, melainkan NU-nya, karena NU memang yang menjadi motor awal. Sedangkan lembaga atau organisasi tadi lebih meru-pakan pendukung ide-ide tentang *civil society*-nya NU.

Namun demikian munculnya lapisan baru yang kritis atau *cultural development oriented* dalam NU sewaktu senior-senior mereka telah menjadi bagian dari kekuasaan masih bisa diharapkan. Mungkin nantinya, jika dalam politik ini NU berhasil, gerakan kultural tidak lagi dijalankan oleh PBNU, tetapi oleh lembaga-lembaga di luar NU meski mereka adalah anak-anak NU sendiri semacam P3M, LAKPESDAM, LKiS, dan lain-lain. Cuma kalau tidak salah, dengan adanya PKB, saya dengar sebagian aktivis gerakan kultural NU mulai agak goyah. Itulah risiko dari sesuatu yang bersifat paradoksal. Jadi harus ada pilihan-pilihan yang mesti diambil supaya tidak menimbulkan kontradiksi.